

Pemantauan Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 di Indonesia

Dampak terhadap Penghidupan Masyarakat yang Bertumpu pada Tenaga Kerja Migran di Kabupaten Malang: Hasil Pemantauan Putaran Kedua

September 2010

Pemantauan
Lokal
No.07/LF/2010

Lembaran Fakta

Selama kunjungan pertama pada September 2009, ditemukan indikasi bahwa kelompok yang paling terkena dampak krisis keuangan global (KKG) 2008/09 adalah para TKI yang bekerja di Korea Selatan (Korsel). Kunjungan kedua ini dilakukan untuk mempertegas temuan pada kunjungan pertama tersebut. Untuk itu, penelitian lebih difokuskan pada kelompok purna-TKI yang baru saja kembali dari Korsel berikut keluarganya. Selain purna-TKI Korsel, purna-TKI yang bekerja di negara-negara lain juga diteliti karena ditemukan indikasi bahwa mereka juga terkena dampak KKG. Selama periode September–Desember 2009, ditemukan perkembangan bahwa tingkat keparahan dampak krisis berbeda baik antarsektor maupun antarjenis usaha dalam sektor yang sama. Yang paling banyak terkena dampak adalah TKI yang bekerja di sektor otomotif. Dampak yang paling banyak mereka rasakan berupa pengurangan atau peniadaan jam lembur yang secara tidak langsung berakibat pada berkurangnya remitensi yang dikirimkan kepada keluarga mereka di Indonesia. Ada sebagian TKI di Korsel yang di-PHK, tetapi mereka tidak langsung pulang ke Indonesia karena mereka mencari pekerjaan di perusahaan lain, terutama, di sektor agrobisnis dengan bekal surat referensi dari majikan lama.

Kondisi perusahaan tempat TKI bekerja di Korea Selatan dan negara-negara lainnya

Dampak KKG terutama dirasakan oleh TKI yang bekerja di Korsel. Krisis di berbagai perusahaan di Korsel, khususnya industri berorientasi ekspor, sudah mulai terlihat indikasinya sejak Mei/Juni 2008 dan mencapai puncaknya pada September/Oktober 2008—aktivitas dan penghasilan TKI terendah terjadi pada bulan-bulan tersebut. Tingkat keparahan krisis berbeda baik antarsektor maupun antarjenis usaha dalam sektor yang sama. Dampak krisis terparah terjadi pada industri otomotif, tetapi tingkat keparahannya juga berbeda antarjenis usaha/produk yang dihasilkan. Ada perusahaan-perusahaan komponen torak yang sampai tutup, sementara perusahaan-perusahaan aksesoris otomotif tidak sampai tutup. Perusahaan-

perusahaan tersebut hanya mengurangi jumlah tenaga kerja, mengurangi jam kerja (mengurangi atau meniadakan jam lembur), atau keduanya.

Hal serupa juga dialami oleh industri-industri lainnya, seperti industri tekstil dan industri injeksi elektronik, walaupun perusahaan-perusahaan tidak sampai tutup. Ada juga perusahaan-perusahaan yang menghilangkan sistem kerja *shift* (giliran). Pengurangan jumlah hari dan jam kerja dilakukan secara bertahap dari lima hari kerja menjadi empat hari kerja, paling sedikit tiga hari kerja, karena perusahaan mengurangi kapasitas produksinya. Kondisi serupa juga terjadi di industri aksesoris otomotif dan konveksi di Malaysia. Salah satu industri aksesoris otomotif yang terkena dampak adalah industri pewangi ruangan mobil. Dampaknya berupa peniadaan jam lembur.

Kondisi berangsur membaik kira-kira pada Oktober 2009 ketika jumlah hari atau jam kerja bertambah kembali mendekati jumlah normal. Namun, pada umumnya, perusahaan-perusahaan belum berani menambah jumlah karyawannya seperti jumlah karyawan sebelum terjadinya KKG. Di lain pihak, ada perusahaan-perusahaan di Korsel yang membuka lowongan pekerjaan untuk mendapatkan pengganti bagi tenaga kerja yang kontraknya menjelang habis.

Di sisi lain, dampak KKG tidak begitu dirasakan oleh para TKI perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Pada umumnya, gaji mereka tidak turun. Bahkan, di Hong Kong, sejak Juni 2009, gaji TKI diterima secara penuh (tanpa potongan pajak dan asuransi—keduanya ditanggung oleh majikan). Kebijakan gaji ini merupakan realisasi dari tuntutan para TKI terhadap Pemerintah Hong Kong.

Kondisi dan Strategi Bertahan TKI di Korsel selama KKG 2008/09

Di Korsel, tenaga kerja yang lebih banyak mengalami PHK adalah tenaga kerja lokal (orang Korsel). Tenaga kerja migran justru mendapatkan prioritas terakhir PHK karena mereka terikat kontrak. TKI yang mengalami PHK tidak langsung pulang. Ada sebagian dari mereka yang pindah kerja ke perusahaan lain, terutama di sektor usaha agrobisnis, untuk bertahan hidup.



BAPPENAS



Australia Indonesia Partnership
Kem.traan Australia Indonesia



Studi ini didanai oleh AusAID.

"Pandangan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan belum tentu mewakili Negara Persemakmuran Australia. Negara Persemakmuran Australia tidak bertanggung jawab atas kerugian terhadap seseorang/ lembaga yang disebabkan oleh informasi maupun pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini."

Seorang TKI bisa pindah ke perusahaan lain jika perusahaan tempatnya bekerja terkena dampak KKG. Menurut penjelasan salah seorang TKI responden, mekanisme yang berlaku adalah pekerja bisa pindah hingga dua kali dengan bekal surat referensi dari majikan lamanya. Ada TKI yang menumpang hidup di tempat temannya dan ada pula TKI yang ditampung oleh perusahaan yang mem-PHK-nya selama 1–2 bulan hingga mereka mendapat pekerjaan baru. Setelah perusahaan lama mereka pulih, para pekerja yang di-PHK dan masih berada di Korsel dipanggil kembali. Ada juga TKI yang meminta bantuan dicarikan pekerjaan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korsel. TKI yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan baru biasanya memilih pulang sebelum visa kerja mereka berakhir. Temuan ini diperkuat oleh hasil konfirmasi tim peneliti SMERU dengan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI) Jawa Timur yang mengatakan bahwa saat ini ada kurang lebih 5.000 calon TKI yang siap diberangkatkan ke Korsel namun tak kunjung berangkat. Hal ini terjadi karena pada saat yang bersamaan, ada banyak TKI di Korsel yang saat ini sedang mengalami *intermit*, yaitu terkena pemutusan hubungan kerja namun belum dipulangkan karena para TKI bersangkutan sedang menunggu kesempatan mendapatkan pekerjaan di perusahaan/pabrik lain.

Dampak KKG yang Dialami oleh Keluarga TKI di Desa Arjowilangun

Dampak KKG yang dirasakan oleh TKI asal Desa Arjowilangun adalah penurunan penghasilan. Sejalan dengan berkurangnya jumlah hari kerja, jam kerja, dan jam lembur, penghasilan yang mereka terima mengalami penurunan sebesar 25%–50%. Sebagai contoh, penghasilan mereka yang biasanya mencapai 9 juta rupiah hingga 11 juta rupiah per bulan, dengan ditiadakkannya jam lembur, turun menjadi hanya 6 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per bulan. Kondisi ini berlangsung selama periode November 2008–Agustus 2009. Selama KKG, biaya hidup para TKI di Korsel juga cenderung meningkat. Hal ini secara otomatis mengurangi jumlah uang yang mereka kirim kepada keluarga mereka di Indonesia. Bahkan, ada sebagian TKI yang selain penghasilannya turun, sekaligus juga kontrak kerjanya tidak diperpanjang atau diputus sebelum waktunya. Akan tetapi, ada juga TKI yang kontrak kerjanya diperpanjang. Pada dasarnya, kondisi ini dialami baik oleh TKI perempuan maupun TKI laki-laki. Persentase penurunan remitensi yang terjadi sama dengan persentase penurunan penghasilan yang diterima. Melemahnya dolar AS terhadap mata uang negara-negara Asia hanya menurunkan remitensi kira-kira sebesar 5% saja.

Akibat dampak KKG ini, keluarga TKI berhemat. Bagi mereka yang sudah terlanjur memulai membangun rumah, sebagai akibat turunnya remitensi, pengeluaran lebih diprioritaskan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bahan bangunan. Pemenuhan kebutuhan tersier, seperti rekreasi, kosmetik, dan belanja barang elektronik, dikurangi. Salah satu jenis barang elektronik yang sebelumnya laku dibeli oleh keluarga TKI adalah perangkat komputer dan laptop. Namun, akhir-akhir ini, minat membeli barang-barang elektronik tersebut juga berkurang.

Setelah kembali ke desanya, sebagian besar dari para purna-TKI kembali menjadi petani. Selain bertani, ada juga purna-TKI yang membuka usaha toko, peternakan, dan dagang ternak, namun ada juga purna-TKI yang baru berencana untuk membuka usaha.

Perkembangan Masyarakat Desa Arjowilangun

Perkembangan Perekonomian Desa Saat Ini

Walaupun para TKI mengalami penurunan penghasilan, jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Desa Arjowilangun, pendapatan mereka masih jauh lebih tinggi. Dengan demikian, penghasilan yang dikirim/dibawa ke desa masih membawa efek positif terhadap perkembangan ekonomi desa. Penghasilan para TKI, selain digunakan untuk kebutuhan konsumtif, juga digunakan untuk membuka usaha dan dikontribusikan untuk dana swadaya pembangunan desa.

Jenis-jenis usaha yang dibuka oleh para TKI, di antaranya, adalah usaha toko HP, elektronik, busana, dan sembako. Dalam tiga bulan terakhir ini, jumlah toko semakin bertambah. Berdasarkan konfirmasi dari beberapa pelaku usaha, usaha toko emas dan toko HP dan aksesoris HP berkembang dengan relatif stabil, sementara perkembangan usaha toko kelontong sangat bergantung pada kelengkapan barang-barang yang dijual (makin lengkap, makin laku). Usaha warnet dan toko baju pun semakin meningkat. Di sisi lain, usaha mebel semakin menurun karena naiknya harga bahan baku dan sulitnya menaikkan harga jual. Bagi pedagang komputer dan laptop, berkurangnya penjualan produk mereka disiasati dengan membuka les komputer yang diharapkan bisa memacu minat pembelian komputer/ laptop.

Semboyan masyarakat Desa Arjowilangun “Tiada hari tanpa membangun” benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Pembangunan rumah penduduk di hampir setiap dusun tak pernah berhenti, sementara pembangunan infrastruktur, terutama peningkatan kualitas jalan desa, terus berlangsung. Jalan desa yang sudah diaspal mencapai 97%. Minat masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa masih tinggi. Baru-baru ini, dalam pelaksanaan acara adat bersih desa, terkumpul dana swadaya Rp50 juta, sementara dalam kegiatan penyemiranan jalan, terkumpul dana swadaya sebesar Rp61 juta, jumlah yang melebihi dana kemitraan dari pemda kabupaten setempat. Bantuan bibit dari Perhutani juga mendorong minat masyarakat untuk membeli bibit tambahan hingga tiga kali lipat secara swadaya. Desa Arjowilangun adalah salah satu desa dengan dana swadaya paling besar se-Provinsi Jawa Timur. Diperkirakan bahwa salah satu faktor pendorong kompaknya masyarakat desa ini dalam membangun desanya adalah akan majunya Desa Arjowilangun pada pemilihan desa teladan se-Provinsi Jawa Timur.

Hasil pertanian tanaman pangan di ladang, terutama padi dan jagung, diperkirakan akan mengalami kegagalan panen akibat tidak normalnya tingkat curah hujan. Saat ini, tanaman padi yang sudah ditanam mengalami kekeringan, namun para petani masih berharap hujan akan turun sehingga mereka dapat menanam ulang padi dan jagung. Selain itu, peternakan besar semakin berkembang, sementara peternakan ayam mengalami penurunan karena banyaknya ayam yang mati akibat cuaca panas. Usaha jual beli tanah pun berkembang di desa ini. Harga tanah meningkat jauh karena tingginya minat para TKI untuk membeli tanah di tempat-tempat yang strategis (jalan protokol) sehingga muncul istilah “uang cari tanah”.

Minat masyarakat usia produktif, terutama mereka yang baru lulus SMA, untuk menjadi TKI tetap tinggi, namun prosesnya semakin sulit. Dampak KKG terhadap calon TKI adalah semakin sulitnya bekerja di Korsel karena berkurangnya lapangan pekerjaan di negara tersebut dan banyaknya perusahaan di Korsel yang lebih suka memakai "orang swasta", yaitu para TKI ter-PHK yang masih menetap disana, karena mereka lebih murah, sudah berpengalaman, dan memiliki kemampuan berbahasa Korea yang baik. Dua hal yang semakin menambah sulitnya menjadi TKI di Korsel adalah adanya penerapan sistem perekrutan G to G (*government to government*) oleh Pemerintah Indonesia dan penerapan peraturan baru di Korsel berupa ketentuan durasi kontrak selama lima tahun sehingga tidak ada lagi sistem rekomendasi perusahaan.



Gambar 1. Ketiadaan sistem irigasi di Desa Arjowilangun menyulitkan masyarakat dalam mengolah lahan pertanian mereka

Dalam sebuah kesempatan diskusi dengan masyarakat, terungkap bahwa kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri merupakan masalah yang paling dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat. Menjadi TKI merupakan imbas dari kurangnya lapangan pekerjaan domestik. Masyarakat berharap dibangunnya industri berbasis sumber daya alam lokal yang dapat menyerap tenaga kerja setempat sehingga minat untuk menjadi TKI ke luar negeri berkurang. Beberapa tahun yang lalu, sempat ada rencana membangun industri semen di sekitar Kalipare, namun rencana tersebut akhirnya tidak terealisasi. Selain itu, ada juga potensi di bidang pertanian yang masih bisa dikembangkan seperti pengolahan hasil pertanian seperti kripik singkong dan hasil peternakan sapi. Masalah lain yang juga dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak adanya sistem irigasi untuk mengairi sawah sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam mengolah lahan pertanian mereka. Jika hanya mengandalkan curah hujan yang tidak menentu, para petani akan sering mengalami gagal panen.

Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Arjowilangun meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya sarana ibadah (masjid ada di setiap RW), pesantren, dan perkumpulan pengajian (ada di setiap RT). Meskipun demikian, pengaruh gaya hidup modern juga semakin kuat, terutama di kalangan remaja. Terungkap bahwa jumlah kasus perselingkuhan dan perceraian cenderung meningkat. Selain itu, akhir-akhir ini, ada semakin banyak kasus "pegat susuk", yaitu menggugat cerai pasangan dengan imbalan uang atau aset (rumah) yang nilainya bisa

mencapai puluhan juta rupiah. Praktik semacam ini, terutama, dilakukan oleh para TKI perempuan.

Kondisi Masyarakat Miskin

Daya beli masyarakat miskin menurun akibat makin tingginya harga barang-barang kebutuhan pokok dan pupuk untuk usaha tani mereka. Untuk menyiasatinya, mereka mengurangi pengeluaran dan menambah jumlah anggota keluarga yang bekerja. Jenis pekerjaan yang memungkinkan adalah pekerjaan di sektor informal seperti buruh tani, tukang cuci, pedagang kecil, dll. Selain itu, mereka yang memiliki lahan garapan menggunakan sebagian lahannya untuk bertanam sayur-sayuran guna memenuhi kebutuhan harian keluarganya. Pemenuhan kebutuhan protein dilakukan dengan memancing ikan di tempat-tempat umum seperti Waduk Karang Kates. Bila membutuhkan bantuan keuangan, mereka meminjam kepada anggota keluarga terdekat (anak atau saudara), tetangga, dan, sebagai alternatif terakhir, bank plecit atau rentenir. Selain menggunakan sistem pelayanan *door to door*, bank plecit tidak menerapkan persyaratan yang rumit dan membolehkan peminjam untuk mencicil secara harian. Sistem pencicilan harian ini efektif bagi bank plecit karena sangat sedikit peminjam yang menunggak, sementara bagi peminjam, terutama pedagang kecil di pasar desa, sistem ini terasa ringan. Selain ringan, cara ini juga merupakan alternatif terakhir bagi keluarga miskin karena mereka tidak memiliki aset yang cukup berharga untuk dijual dan menghasilkan uang.

Program dan Bantuan Pemerintah

Pembangunan infrastruktur terus dilakukan di setiap dusun Desa Arjowilangun. Misalnya, pembangunan jalan penghubung antara Dusun Duren dan Dusun Barisan dengan dana PNPM dimulai kira-kira pada Oktober 2009. Tahap persiapan kegiatan pembangunan tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat, namun pelaksanaan pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada pemborong.

Selain itu, program-program pemerintah yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan masih berjalan dengan cukup baik. Dari hasil wawancara dengan beberapa warga miskin di Desa Arjowilangun, terungkap bahwa Raskin dan BLT secara konkret mampu meringankan beban masyarakat miskin. Di balik kontroversi efektivitas kedua program, menurut sebagian masyarakat, program-program tersebut dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk beberapa tahun ke depan, kedua program masih dibutuhkan, namun kualitasnya harus ditingkatkan. Untuk Raskin, ada keluhan terkait kualitas beras yang tidak memenuhi syarat kesehatan (bau apak, misalnya), sementara mekanismenya yang mengharuskan penerima untuk membayar dirasa masih terlalu berat. Untuk BLT, keluhan-keluhan yang disampaikan adalah jumlah uang yang tidak sama pada setiap pencairan BLT dan daftar nama penerima BLT yang sering berganti-ganti karena adanya kesalahan data keluarga miskin. Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga merupakan salah satu program yang dirasa meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat miskin yang memiliki anak usia sekolah. Dengan adanya BOS, sekolah-sekolah membebaskan iuran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Meskipun demikian, orang tua murid seringkali masih dibebani oleh pembelian seragam dan peralatan sekolah dari pihak sekolah,

selain biaya-biaya lainnya seperti biaya transpor. Dana BOS tidak diterima secara penuh di Kabupaten Malang akibat tidak adanya dana pendampingan dari pemerintah kabupaten dan, oleh karenanya, pemerintah provinsi tidak bisa menurunkan dananya.



Gambar 2. Dengan dana PNPM, Desa Arjowilangun membangun salah satu ruas jalannya

Terkait dengan keluarga TKI, karena kebanyakan dari mereka termasuk ke dalam golongan menengah ke atas, sebagian besar tidak menerima BLT. Meskipun demikian, mereka dapat mengakses bantuan beras Raskin karena aparat desa menerapkan kebijakan membagi rata beras raskin di antara semua warga desa, tidak hanya keluarga miskin saja. Di samping itu, sebagian besar keluarga di Desa Arjowilangun, termasuk keluarga TKI, juga mendapatkan bantuan konversi dari minyak tanah ke gas dari pemerintah, namun ada banyak di antara mereka yang belum menggunakannya karena mereka tidak terbiasa memakai kompor gas. Sebelumnya, banyak keluarga mampu sudah memiliki kompor gas, namun mereka tetap mendapatkan bantuan konversi ke gas tersebut.

Dari hasil konfirmasi dengan pihak aparat pemerintah di tingkat kabupaten, pemerintah sudah mulai mengimplementasikan beberapa program yang secara tidak langsung terkait dengan dampak KKG. Walaupun program-program tersebut tidak secara khusus dirancang untuk mengantisipasi dampak KKG, program-program tersebut diharapkan dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan pada gilirannya dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak krisis. Salah satu program tersebut adalah bantuan modal berupa dana hibah untuk kelompok usaha wanita sebesar Rp25 juta untuk tiap kelompok usaha yang disalurkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Setelah dilakukan konfirmasi dengan salah satu kelompok usaha wanita di Kecamatan Donomulyo, terungkap bahwa proposal yang diajukan oleh kelompok usaha tersebut sudah disetujui dan dana diharapkan akan cair pada akhir 2009. Selain bantuan modal, kelompok usaha tersebut juga mendapatkan bantuan pelatihan membuat kripik belinjo dan pisang yang diselenggarakan oleh Disnakertrans pada 7–8 Desember 2009.



Gambar 3. Dalam upayanya membuka kesempatan kerja ke luar negeri bagi masyarakat, Disnakertrans Kabupaten Malang menyelenggarakan pameran ketenagakerjaan

Menjawab pertanyaan tim peneliti tentang perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dalam tiga bulan terakhir, Disnakertrans Kabupaten Malang menyampaikan bahwa mereka sedang mempersiapkan penyelenggaraan sebuah *job fair* (pameran ketenagakerjaan) bertajuk *Working to USA* di kantor Disnakertrans Kabupaten Malang pada 17 Desember 2009. *Job fair* tersebut terselenggara atas kerja sama antara pemerintah setempat dan sebuah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang mendapatkan *job order* (pesanan kerja) dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Dalam *job fair* tersebut, dilakukan perekrutan tenaga kerja untuk pengiriman pada tahun depan. Namun, tim peneliti mendapatkan informasi dari pihak UPT P3TKI Jawa Timur di Surabaya bahwa perusahaan penyelenggara pameran *Working to USA* tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amerika Serikat. Kegiatan sejenis juga pernah diselenggarakan di Jakarta, namun kegiatan tersebut dibubarkan karena pihak penyelenggara tidak mendapatkan izin kegiatan. ■

Lembaran fakta ini disusun oleh Nina Toyamah dan Rachma Indah Nurbani berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Nina Toyamah, Rachma Indah Nurbani, Ari Ratna Kumiastuti, dan Mutmainnah pada pertengahan Desember 2009. Penelitian lapangan ini merupakan kunjungan kedua dari tiga kali kunjungan yang rencananya akan dilakukan setiap empat bulan sekali dalam rangka kajian "Pemantauan Dampak Sosial-Ekonomi Krisis Keuangan Global 2008/09 di Indonesia" yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU. Editor: Budhi Adrianto.

Kunjungi situs web kami di:



<http://www.smeru.or.id>